



**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022**



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta perkenan-Nya, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 yang merupakan amanat konstitusional dapat diselesaikan.

Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Ruang lingkup laporan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, antara lain:

- a. Capaian kinerja makro;
- b. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- d. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. Inovasi daerah.

Gambaran kinerja tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Sudah pasti dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada tahun 2022, akan kami jadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja pada tahun mendatang. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kami ke depan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya, seraya berharap, semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kepulauan Selayar, senantiasa memperoleh petunjuk serta ridha Allah SWT.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Benteng, 29 Maret 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. MUH. BASLI ALI

I. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD. LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup, penyusunan, dan penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD, pelaksanaan EPPD, dan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Secara astronomis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara $5^{\circ}40' \sim 7^{\circ}35'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}15' \sim 122^{\circ}30'$ Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gugusan pulau yang terletak di ujung selatan Jazirah Sulawesi yang secara administratif menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagaisalah satu kabupaten dan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesidengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar;
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km²dimana luas daratan 1.357,03 km², sedangkan luas laut 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai 670 km.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 81(delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sesuai

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perubahan yang kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi atas, 3 Staf Ahli Bupati, 3 Asisten Sekretaris Daerah, 9 Bagian pada Sekretariat Daerah dan 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 18 Dinas, 4 Lembaga Teknis Daerah dan 11 Kecamatan.

Dalam hal produk hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun 2022 telah dihasilkan produk hukum daerah yang terdiri dari 11 Peraturan Daerah, 49 Peraturan Bupati, dan 644 Keputusan Bupati. Sementara itu jumlah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai akhir tahun 2022 sebanyak 3.794 orang, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3.534 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sebanyak 260 orang.

III. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Tabel 1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	2		3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	67,76	68,35	0,87
2	Angka Kemiskinan	Persen	12,45	12,24	-1,69
3	Angka Pengangguran	Jiwa	2.011	1.091	-45,74
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,02**	3,67**	-8,71
5	Pendapatan Per kapita	Juta Rupiah	49,57**	53,76**	8,45
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	-	0,354	0,350	-1,13

Sumber Data : BPS Nasional dan BPS Kepulauan Selayar 2023

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 67,76 % pada tahun 2021, angka tersebut meningkat menjadi 68,35 % pada tahun 2022. angka indeks pembangunan manusia telah mengalami peningkatan dari tahun 2021

sebesar 0,87 % sampai pada tahun 2022, ini dikarenakan meningkatnya sejumlah indikator pembentuk IPM seperti Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Pendidikan (Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) yang menunjukkan semakin membaiknya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat. Fakta ini membuktikan bahwa kinerja pembangunan manusia Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat.

b. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non- Makanan (GKNM). Perhitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perbedaannya.

Angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 12,24 % mengalami penurunan sebesar -1,69 % % dibanding tahun 2021 yang sebesar 12,45 %. Selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi tren penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun.

c. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 sebesar 2.011 Jiwa dan pada tahun 2022 menurun sebesar -45,74 % menjadi 1.091 Jiwa. Pencabutan peraturan pembatasan aktifitas ekonomi masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap geliat aktifitas ekonomi dan usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar, hal inilah yang berdampak terhadap terbukanya Kembali lapangan pekerjaan yang pada akhirnya mampu menyerap penduduk yang tidak memiliki pekerjaan.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh potensinya baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi sektoral dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan yang memberikan informasi tentang komposisi per sektor yang memberi andil pada perekonomian daerah. Kontribusi suatu sektor dapat meningkat secara normal, namun menurun secara persentase. Oleh sebab itu, untuk keperluan analisis, angka persentase distribusi sektoral menjadi lebih penting.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 (angka sangat sementara) sebesar 3,67 % atau mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,02 %.

e. Pendapatan Per Kapita

PDRB Perkapita adalah Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Pendapatan Perkapita pada tahun 2022 mengalami peningkatan disebabkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021, Pendapatan perkapita meningkat seiring dengan meningkatnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Perubahan gini ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami kenaikan menunjukkan ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk meningkat.

Berdasarkan data BPS tingkat ketimpangan pendapatan penduduk kepulauan selayar tahun 2022 yang diukur oleh Rasio Gini adalah adalah 0,350 menurun -1.13 % dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,354. Terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Kepulauan Selayar dari Tahun 2021 sebesar 0,354 menjadi 0,350 untuk Tahun 2022. Turun 0,004 poin. Seperti diketahui, distribusi pendapatan makin merata jika nilai gini rasionya mendekati 0. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gini rasionya makin mendekati satu.

IV. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR;

Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Hasil Pada Urusan Pelayanan Dasar
Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KET.
A	URUSAN PENDIDIKAN		
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	88,46%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	73,65%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	57,36%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	1284,14%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

NO.	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KET.
	kesetaraan		
B	URUSAN KESEHATAN		
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,095%	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	72,96 %	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	79,62 %	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84 %	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	56,90 %	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68,97 %	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60,11 %	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	85,67 %	Dinas Kesehatan
C	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	78,73 %	Dinas PUTR
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	9,15 %	Dinas PUTR
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1,78 %	Dinas PUTR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	54,313 %	Dinas PUTR
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0 %	Dinas PUTR (Tidak ada kegiatan tahun 2022)
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100 %	Dinas PUTR
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	58,239 %	Dinas PUTR
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang	7,3 %	Dinas PUTR

NO.	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KET.
	memiliki sertifikat kompetensi		
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 %	Dinas PUTR (Belum ada pendataan terkait kecelakaan konstruksi)
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	82,14 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tidak ada data rumah yang terdampak relokasi program pemerintah).
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	10,75 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	13,07 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	27,35 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
E	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	40 %	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	8,14 %	BPBD
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	74,98 %	BPBD
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	92,68 %	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	6,63 menit	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
F	SOSIAL		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	99,08 %	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	Dinas Sosial

V. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA;

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat setiap tahun melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan

otonomi daerah sebagai konsekuensi penyerahan beberapa kewenangan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan atas LPPD yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Mendagri melalui Gubernur.

Penilaian EPPD atas LPPD Pemerintah Daerah tahun 2019, 2020 dan 2021 belum ada rilis hasil evaluasi yang dikeluarkan dari Tim Nasional EPPD Kemendagri RI.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Tabel 4
Opini BPK atas Laporan Keuangan

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Status	WTP LKPD 2021	WTP LKPD 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator yaitu dengan capaian WTP Telah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi tahun 2022 mencapai opini WTP BPK RI atas LKPD tahun 2021, dari target WTP dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan (Baik). Opini BPK atas laporan keuangan diperoleh dari Hasil Audit BPK RI terhadap LKPD tahun 2021. Realisasi Indikator dari Tahun 2016-2021 mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan hal tersebut telah mencapai target.

Raihan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar selama 6 kali sejak tahun 2016-2021 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

VI. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Gambaran kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 merupakan gambaran keuangan *unaudited* (sebelum keluarnya hasil audit oleh BPK). Gambaran ini terdiri atas target dan realisasi keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Daerah Tahun 2022 pada Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.076.341.645.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.021.771.355.235,53 dengan capaian realisasi sebesar 94,93%, adapun realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kelompok pendapatan dan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.65.338.779.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.54.417.747.197,53 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 83,29%. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.12
Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.338.779.000,00	54.417.747.197,53	(11.921.031.802,47)	83,29
1 PAJAK DAERAH	10.655.430.000,00	11.755.580.460,72	1.100.150.460,72	110,32
2 RETRIBUSI DAERAH	3.000.028.000,00	2.163.203.270,00	(836.824.730,00)	72,11
3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12.204.038.000,00	12.171.072.548,76	(32.965.451,24)	99,73
4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	39.479.283.000,00	28.327.890.918,05	(11.151.392.081,95)	71,75

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

2. Pendapatan Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 980.430.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 953.675.230.094,00 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 97,27%.

Adapun realisasi Dana Perimbangan Daerah Tahun 2022 tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.13
Realisasi Dana Perimbangan Daerah 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN TRANSFER	980.430.700.000,00	953.675.230.094,00	(26.755.469.906,00)	97,27
A. Pendapatan Transfer	854.797.236.000,00	830.264.598.395,00	(24.532.637.605,00)	97,13
Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
1 Dana Bagi Hasil	18.235.632.000,00	24.223.459.668,00	5.987.827.668,00	132,84
2 Dana Alokasi Umum	560.595.329.000,00	559.925.703.281,00	(669.625.719)	99,88
3 Dana Alokasi Khusus	275.966.275.000,00	246.115.435.446,00	(29.850.839.554)	89,18
B. Pendapatan Transfer	73.995.426.000,00	73.995.426.000,00	0,00	100,00
Dana Pusat - Lainnya				
1 Dana Insentif Daerah (DID)	2.950.221.000,00	2.950.221.000,00	0,00	100,00
2 Dana Desa	71.045.205.000,00	71.045.205.000,00	0,00	100,00
C. Transfer Pemerintah Provinsi	51.638.038.000,00	49.415.205.699,00	(2.222.832.301,00)	95,70
1 Pendapatan Bagi Hasil	35.000.000.000,00	30.038.890.451,00	(4.961.109.549,00)	85,83
2 Bantuan Keuangan	16.638.038.000,00	19.376.315.248,00	2.738.277.248,00	116,46

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 30.572.166.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.678.377.944,00 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 44,74%. Adapun realisasi Pendapatan Lain-lain Daerah yang sah untuk Tahun 2022 tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.14
Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah Tahun 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
LAIN-LAIN				
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.572.166.000,00	13.678.377.944,00	(16.893.788.056,00)	44,74
1 0,00	0,00	0,00	0	96,14
2 30.572.166.000,00	13.678.377.944,00	(16.893.788.056,00)	44,74	86,78

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.142.790.872.508,00 dan terealisasi sebesar Rp.998.714.788.059,52 dengan capaian realisasi sebesar 87,39%, adapun realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudit disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2022

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Belanja Daerah		1.142.790.872.508,00	998.714.788.059,52	(143.944.406.519,48)	87,39
Belanja Operasi		722.556.709.386,00	664.869.638.253,52	(57.687.071.132,48)	92,02
1	Belanja Pegawai	364.901.803.234,00	354.916.349.730,52	(9.985.453.503,48)	97,26
2	Belanja Barang dan Jasa	316.962.013.858,00	271.167.735.291,00	(45.794.278.567,00)	85,55
3	Belanja Hibah	31.903.258.994,00	30.327.841.932,00	(1.575.417.062,00)	95,06
4	Belanja Bantuan Sosial	8.789.633.300,00	8.457.711.300,00	(331.922.000,00)	96,22
Belanja Modal		282.144.496.540,00	196.692.630.353,00	(85.451.866.187,00)	69,71
1	Belanja Modal Tanah	3.366.607.000,00	1.886.851.800,00	(1.479.755.200,00)	56,05
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.454.908.978,00	40.530.407.319,00	(2.924.501.659,00)	93,27
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.702.908.287,00	74.323.315.084,00	(39.379.593.203,00)	65,37
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	119.721.092.275,00	78.055.523.650,00	(41.665.568.625,00)	65,20
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100
7	Belanja Aset Lainnya	1.860.980.000,00	1.858.532.500,00	(2.447.500)	99,87
Belanja Tidak Terduga		2.250.000.000,00	1.444.530.800,00	(805.469.200,00)	64,20
1	Belanja Tidak Terduga	2.250.000.000,00	1.444.530.800,00	(805.469.200,00)	64,20
Belanja Transfer		135.839.666.582,00	135.707.988.653,00	(131.677.929,00)	99,90
1	Bagi Hasil Pajak	1.200.000.000,00	1.095.442.800,00	(2.295.442.800,00)	91,29
2	Bagi Hasil Retribusi	300.000.000,00	273.860.700,00	(573.860.700,00)	91,29
3	Belanja Bantuan Keuangan	134.339.666.582,00	134.338.685.153,00	(981.429,00)	99,99

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

1. Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 722.556.709.386,00 dan terealisasi sebesar Rp. 664.869.638.253,52 dengan capaian realisasi sekitar 92,02%.
2. Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 282.144.496.540,00 dan terealisasi sebesar Rp. 196.692.630.353,00 dengan capaian realisasi sekitar 69,71%.
3. Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.444.530.800,00 dengan capaian realisasi sekitar 64,20%.
4. Belanja Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 135.839.666.582,00 dan terealisasi sebesar Rp. 135.707.988.653,00 dengan capaian realisasi sekitar 99,90%.

c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 terdiri atas 2 komponen yaitu penerimaan pembiayaan yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komponen kedua yaitu Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas penyertaan modal daerah, adapun realisasi pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kelompok pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 1.16
Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan

URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Surplus/ Defisit	(66.449.227.508,00)	23.056.567.176,01	89.505.794.684,01	0,00
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan	66.449.227.508,00	66.660.837.653,41	211.610.145,41	100,32
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.449.227.508,00	66.449.227.508,41	0,00	100,00
2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	206.006.345,00	206.006.345,00	0,00
3 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	5.603.800,00	5.603.800,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	66.449.227.508,00	66.660.837.653,41	211.610.145,41	100,32
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	89.717.404.829,42	89.717.404.829,42	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

VII. INOVASI DAERAH

NO.	OPD/INOVASI	TUJUAN INOVASI	MANFAAT INOVASI	KETERANGAN
1	Dinas Peternakan			
	1. "Poster Tanadoang " Inovasi Poster Tanadoang atau Pos Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu Tanadoang yang merupakan langkah terobosan dan inovasi penguatan sistem pelayanan kesehatan hewan terintegrasi yang melibatkan stakeholder dan pemangku kepentingan terkait peternakan dan kesehatan hewan. Poster Tanadoang merupakan inovasi yang keberadaannya dapat memberikan solusi untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan hewan yang lebih baik kepada peternak dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui	1. Pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program Pelayanan Publik dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan serta menekan angka kejadian penyakit dan kematian ternak yang dapat menimbulkan dampak ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat peternak di Kabupaten	1. Meningkatnya minat peternak dalam melaporkan penyakit dan peningkatan pengetahuan peternak tentang kesehatan hewan. 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan, penurunan angka kematian dari kasus penyakit dan peningkatan populasi ternak. 3. Memudahkan pelayanan oleh petugas kesehatan hewan, indeks kepuasan masyarakat dan kontribusi PAD sektor pertanian.	

	<p>penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Hewan yang terintegrasi berbasis masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait dalam membantu peternak mengidentifikasi dan melaporkan penyakit ternak serta untuk meningkatkan mutu pelayanan guna mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan ternak yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.</p> <p>Kehadiran Poster Tanadoang sebagai bentuk program Inovasi dari sebuah produk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang diterima oleh masyarakat memegang peranan yang strategis dalam rangka mewujudkan good governance di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Kepulauan Selayar.</p> <p>2. Inovasi ini sangat diharapkan dapat membantu penyediaan pertanian yang berkelanjutan dalam menjaga ketersediaan produksi bahan pangan hewani dan memastikan produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar sehat dan aman untuk dikonsumsi untuk menjamin ketahanan pangan dengan sumber daya yang efisien dan merupakan bagian penting dalam perbaikan nutrisi bagi masyarakat, membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, sehingga menjadi modal pembangunan untuk mengisi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.</p>		
	<p>2. “Gerakan Desa Gambus” Gerakan Desa Gemar Menanam Buah dan Sayur (Desa Gambus) digagas untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional harus dimulaidari rumah tangga dengan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai alternative. Salah satu upaya mendukung program strategis dan program pendukung yaitu Gerbangsari. Selain itu, sejalan pula dengan Program Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Gerakan Desa Gemar Menanam Buah dan Sayur merupakan suatu gerakanyangmelibatkan beberapa pihak secara massif dan terintegrasi disemuadesa/kelurahan dalam wadah Kelompok Wanita Tani(KWT)</p>	<p>1. Mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan B2SA</p> <p>2. Membudayakan konsumsi sayuran dan buah dalam keluarga</p> <p>3. Mewujudkan system pertanian lestari yang ramah lingkungan</p>	<p>1. Meningkatkan keterampilan dan pemahaman KWT</p> <p>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi sayur dan buah</p> <p>3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan Meningkatkan kualitas SDM pertanian</p>	
2	Dinas Lingkungan Hidup			
	1. TANGKASA	Mengurangi timbulan sampah di tempat-tempat wisata yang berbasis 3R	Berkurangnya timbulan sampah ditempat-tempat wisata	
	2. Eco Pertashop	1. Terwujudnya lembaga penyalur Bahan Bakar Resmi berskala kecil sesuai standar ECO Perthashop	1. Meminimalisir dampak pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan Pertashop 2. Kestabilan Harga BBM dapat diatasi	

		2. Meningkatnya Ketaatan pelaku usaha ECO Perthashop		
	3. Kampung Ekonomi Hijau	Terwujudnya Kampung Ekonomi Hijau melalui pendampingan pelaku usaha rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan taman 2. Mendorong Keterlibatan pelaku usaha dalam pengelolaan kegiatan yang berbasis ramah lingkungan 3. Memperkuat kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait 	Program Kampung Ekonomi Hijau merupakan salah satu solusi dalam upaya pengendalian dampak perubahan iklim. Dengan kegiatan ramah lingkungan dapat memaksimalkan pengelolaan potensi dan sumberdaya alam yang ada. Masyarakat dapat mengambil peran dalam memantau, mengawasi dan melestarikan lingkungan. Dengan Program Kampung Iklim diharapkan masyarakat dapat menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan secara ekologi.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	1. Sejam Layanan Kelar (SELAYAR)	<p>A. Maksud Inovasi : Melalui Inovasi tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik dan lebih cepat mulai dari proses verifikasi berkas permohonan sampai pada penerbitan dokumen kependudukan melalui dukungan berkas yang sudah lengkap</p> <p>B. Tujuan Inovasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, transparan dan gratis 2. Dapat menyediakan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. 	<p>A. Manfaat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Pemerintah : <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi b. Memiliki system pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat c. Meningkatkan capaian dan target nasional yang telah ditetapkan serta dapat meningkatkan kinerja organisasi 2. Bagi Masyarakat : <ol style="list-style-type: none"> a. Memudahkan dalam pengurusan dokumen kependudukan b. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat c. Memberi kepuasan terhadap layanan yang diberikan 3. Hasil: <ol style="list-style-type: none"> a. Proses pelayanan lebih mudah, lebih cepat,transparan dan gratis b. Meningkatkan cakupan penerbitan dokumen dan target nasional yang telah di tetapkan c. Dapat meningkatkan kinerja organisasi 	

	2. Anak Lahir Membawa Akta Kelahiran (ALAMAKKK)		A. Manfaat : 1. Masyarakat dapat terlayani langsung ke Rumah Sakit atau Puskesmas dan Kecamatan 2. Semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan 3. Capaian target kepemilikan akta kelahiran semakin meningkat.	
	3. Layanan Cepat Administrasi Kependudukan (LACAK)	Tujuan Inovasi adalah untuk Meningkatkan pelayanan Adminduk dalam bentuk pelayanan jemput bola dari pintu ke pintu dengan menjemput dan mengantarkan dokumen hasil pelayanan guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat	A. Manfaat : a. Memudahkan dalam pengurusan dokumen kependudukan b. Masyarakat dapat langsung terlayani dikediamannya masing-masing c. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat d. Memberi kepuasan terhadap layanan yang diberikan	
	4. LAKUWA (Layanan Adminduk melalui WhatsApp)	Tujuan dari inovasi ini adalah meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp Disdukcapil	B. Manfaat : 1. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat 2. Memberi kepuasan terhadap layanan yang diberikan	
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
	1. Sistem Informasi Desa (SIDESA) Merupakan Inovasi berupa aplikasi yang akan memudahkan pemerintah desa dalam hal menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi di desa. Disamping itu masyarakat akan memperoleh kemudahan untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi di kantor desa.	1. Sebagai upaya dalam Penataan administrasi desa dengan yang baik 2. Untuk memudahkan dalam mengakses informasi terkait kelengkapan administrasi di tiap desa	1. Pemerintah desa telah menerapkan dasar-dasar digitalisasi dengan mengkoneksikan beberapa dokumen administrasi pemerintahan desa dalam aplikasi SIDESA sehingga memudahkan pengambil kebijakan dalam mengakses informasi serta data-data sebagai bahan penyusunan perencanaan baik di kabupaten maupun didesa. 2. Pemerintah Desa akan menerapkan digitalisasi secara menyeluruh dengan memprogramkan dan menganggarkan kegiatan desa digital dalam APBDesa Tahun 2023 khususnya yang berstatus desa mandiri.	
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
	1. Aktifasi Kelembagaan Melalui Pola Penerapan Sistem Pembelajaran Terhadap Koperasi Percontohan	Sebagai model koperasi yang sehat yang akan menjadi percontohan bagi koperasi lainnya sehingga mampu mensejahterakan anggotanya dan menggerakkan ekonomi masyarakat	Terbentuknya koperasi percontohan di setiap kecamatan	
	2. Pengembangan Komoditi Kelapa dan Turunannya Melalui Satu Pintu dalam Wadah Gerbang Sari	Agar komoditi kelapa Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai nilai tambah secara ekonomi melalui produk turunannya sehingga diharapkan	Terbentuknya sentra pengolahan komoditi kelapa dan turunannya di beberapa desa	

		mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa		
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja			
	1. Investment Project Ready to Offer (IPRO)	IPRO adalah kajian kelayakan suatu bidang usaha pada suatu proyek investasi yang memenuhi aspek hukum dan kelembagaan, aspek teknis, aspek ekonomi dan komersial, aspek lingkungan dan sosial, aspek bentuk dan cara pengusahaan, aspek pengelolaan resiko, serta aspek kebutuhan fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang disusun secara akurat dan lengkap, sehingga ketika ditawarkan dan dipromosikan kepada investor, dokumen Prastudi Kelayakan tersebut menjadi lebih bermutu dan bernilai (marketable).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh gambaran uraian latar belakang dan gambaran umum dari pendirian, pengembangan dan pengoperasian bidang usaha pada proyek investasi 2. Memperoleh gambaran uraian tentang kemungkinan (alternatif) bentuk badan hukum Indonesia yang dapat didirikan dalam rangka pendirian, pengembangan dan pengoperasian bidang usaha pada proyek investasi. 3. Memperoleh gambaran situasi lokasi bidang usaha pada proyek investasi sesuai posisi alamatnya yang tergambar secara rinci pada peta format digital 4. Memperoleh gambaran makro pada kabupaten/kota tempat lokasi bidang usaha pada proyek investasi yang akan didirikan, dikembangkan dan dioperasikan 5. Memperoleh gambaran dampak positif dan negatif yang timbul dalam kaitan pendirian, pengembangan dan pengoperasian bidang usaha pada proyek investasi 6. Memperoleh gambaran analisa rencana investasi, sumber dana beserta asumsi-asumsi dan proyeksinya. 7. Memperoleh gambaran uraian sejauh mana risiko yang dihadapi badan usaha yang akan mendirikan, mengembangkan dan mengoperasikan bidang usaha pada proyek investasi 	
	2. Pusat Pelayanan Perizinan Kecamatan Kepulauan (Saya Pria Cakep)	<ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan layanan perizinan dan non perizinan di 5 (lima) kecamatan Kepulauan b. menciptakan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat kecamatan kepulauan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan; dan c. memberikan kenyamanan dan keterjangkauan bagi masyarakat kecamatan kepulauan dalam mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan 	Masyarakat Pulau yang mengurus perizinan usaha dan Izin lainnya tidak perlu ke Ibukota Kabupaten (Benteng), cukup datang ke Kantor Camat masing-masing. Kegiatan ini diawali dengan penyiapan operator minimal 1 (satu) orang per Kecamatan Pulau, 1 Set Komputer/Laptop serta jaringan Internet.	
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
	1. Aktifasi Kelembagaan Melalui Pola Penerapan Sistem Pembelajaran Terhadap Koperasi Percontohan	Sebagai model koperasi yang sehat yang akan menjadi percontohan bagi koperasi lainnya sehingga mampu mensejahterakan anggotanya dan	Terbentuknya koperasi percontohan di setiap kecamatan	

		menggerakkan ekonomi masyarakat		
	2. Pengembangan Komoditi Kelapa dan Turunannya Melalui Satu Pintu dalam Wadah Gerbang Sari	Agar komoditi kelapa Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai nilai tambah secara ekonomi melalui produk turunannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Terbentuknya sentra pengolahan komoditi kelapa dan turunannya di beberapa desa	
8	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
	Kredit Tanadoang Melawan Rentenir (Kreta Melati) kerjasama BPR dengan Bunga 6 %	Membantu Permodalan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Pasar dan Usaha Mikro dalam Meningkatkan Usahanya	Berkurangnya Pedagang Kecil Mengakses Permodalan melalui Rentenir dan Membangun Kesadaran Masyarakat untuk melawan Rentenir	
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
	1. Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Geografis Information System (SIJAGAI)	Terwujudnya pelayanan informasi aset berbasis online melalui system informasi manajemen aset berbasis georafis information system di kabupaten Kepulauan Selayar	Memberikan Kemudahan dalam mengintegrasikan data asset di OPD masing-masing dan meningkatkan keamanan data karena sudah tersimpan di aplikasi	
	2. Pelaporan Keuangan Berbasis Insta Komunal	Untuk mendukung perbaikan organisasi dari sisi integritas dan akuntabilitas dengan mengusung konsep keterbukaan informasi pada komunitas penyusun laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.	Memberikan kemudahan bagi tim untuk menyebarluaskan informasi secara tepat waktu untuk memastikan seluruh jadwal pelaporan keuangan telah memenuhi kaidah waktu pelaporan	
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	1. Aplikasi Pensiun (SIMPOLE)	Terwujudnya digitalisasi dokumen pensiun dengan penerapan aplikasi layanan pensiun secara online sehingga proses pengurusan berkas pensiun menjadi cepat dan tepat	Kemudahan akses dalam layanan pensiun dan percepatan penerbitan SK Pensiun serta Penerbitan SK Pensiun tepat waktu	
		Terwujudnya proses pengusulan pensiun yang tepat dan cepat bagi semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar		
		Terwujudnya pelayanan penertiban SK pensiun PNS yang optimal dengan penggunaan Sistem Teknologi Informasi Pensiun Online		
	2. Aplikasi E-Pangkat	Terwujudnya digitalisasi dokumen kenaikan pangkat dengan penerapan aplikasi layanan kenaikan pangkat secara online sehingga proses pengusulan berkas menjadi cepat dan tepat	Kemudahan akses dalam layanan kenaikan pangkat dan percepatan penerbitan SK kenaikan pangkat serta penerbitan SK kenaikan pangkat tepat waktu	
		Terwujudnya proses pengusulan kenaikan pangkat yang tepat dan cepat bagi semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar		

		Terwujudnya pelayanan penerbitan SK kenaikan pangkat yang optimal dengan penggunaan Sistem Teknologi Informasi Kenaikan Pangkat Online		
	3. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Produk Kepegawaian Berbasis Elektronik (SISUKSES)	Terwujudnya transparansi proses dan status layanan kepegawaian	Mempermudah memperoleh informasi berkaitan dengan dokumen kepegawaian sehingga evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyelesaian dokumen pegawai dapat real time dan akurat	
			Mengurangi Human Error dalam pelaksanaan pemantauan proses penyelesaian dokumen kepegawaian	
11	Kecamatan Bontomanai			
	Warkop Desa (Warung Koordinasi Pemerintahan Desa)	Mewujudkan tata pengelolaan dana desa yang efektif,efesien,transparan dan akuntabel	Terwujudnya kemudahan dalam pengawasan dana desa	
12	Kecamatan Bontoharu			
	CEIN (Community Empowermen Istri Nelayan)	<p>Maksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan/ memandirikan istri istri Nelayan lewat Organisasi kelompok (CEIN) 2. Meningkatkan Keterampilan, Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk CEIN (Community Empowermen Istri Nelayan) 2. Melakukan kegiatan pengolahan rebon menjadi terasi, pengemasan dan pemasaran 3. Meningkatkan keterampilan CEIN Inovasi Produk Terasi Bubuk) 4. Pemberian nama, label dan kemasan yang menarik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat kepada organisasi : <ul style="list-style-type: none"> - Berkontribusi pada percepatan terwujudnya Visidan Misi Kabupaten Kepulauan Seayar 2. Manfaat Kepada masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya CEIN - Terolahnya hasil tangkapan nelayan - Terciptnya Sumber Pendapatan Baru 	CEIN (Community Empowermen Istri Nelayan)
13	Kecamatan Pasimasunggu			
	Karped Sehat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka memberikan dukungan finansial kepada pasien rujukan	50 orang	Swadaya Masyarakat
12	Kecamatan Pasimasunggu Timur			
	Pengembangan obyek wisata dengan konsep mengintegrasikan wisata alam dan agro wisata dalam satu kawasan	Peningkatan pengelolaan obyek wisata yang memenuhi aspek penting dalam pengembangan pariwisata yaitu 3A (Atraksi, Amenitas dan Aksebilitas) dan memenuhi unsur sapta pesona sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan daya saing antar obyek wisata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kreatifitas dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsi 2. Meningkatkan peranan Camat dalam pembinaan kemasyarakatan khususnya pemberdayaan masyarakat 3. Peningkatan Pendapatan Asli Desa 4. Peningkatan kapasitas BUMDES dalam mengelola obyek wisata Desa 5. Memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan pengembangan pariwisata 	

VIII. PENGHARGAAN YANG DIRAIH PADA TAHUN 2022

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan) cabang Makassar, atas partisipasinya terhadap pembiayaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja informal (31 Maret 2022)..
2. Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali menerima penghargaan atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021, (5 April 2022).
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penghargaan BKN Award 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada kategori penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAT. (21 Juli 2022).
4. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (22 Juli 2022).
5. Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil meraih 4 (empat) penghargaan pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-50 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Empat penghargaan yang diraih itu adalah juara 2 tertib administrasi, juara 2 lansia tangguh, juara harapan 1 hatinya PKK kategori kebun bersama, serta juara 2 Inovasi posyandu terintegrasi. (24 Agustus 2022).
6. Penghargaan BKN Award 2022 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN pengelola kepegawaian di lingkup Instansi Pusat dan Instansi Daerah. (20 September 2022).
7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima penghargaan sebagai Nominasi TPID atas komitmen Pemkab Selayar terus mendorong pengendalian inflasi daerah. (14 September 2022).
8. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima medali emas dari cabor sepak takraw double event putri dalam Porprov XVII Sulawesi Selatan (24 Oktober 2022).
9. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima 2 medali emas dari cabor renang Porprov XVII Sulawesi Selatan (24 Oktober 2022).
10. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima penghargaan Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun 2022 Kementerian Desa melalui salah satu Kepala Desa yaitu Desa Barugaia. (29 November 2022).
11. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima piagam penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021 dengan opini WTP. (01 Desember 2022).

IX. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, disadari sepenuhnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan komitmen bersama untuk melayani, memberdayakan dan membangun masyarakat. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, beserta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus bekerja keras dalam mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar kearah peningkatan kesejahteraan yang lebih baik dimasa yang akan datang, Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Benteng, 29 Maret 2023

The official seal of Kabupaten Kepulauan Selayar is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "KEPULAUAN SELAYAR" and "BUPATI KEPULAUAN SELAYAR".
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. MUH. BASLI ALI